

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia tidak pernah terlepas dari orang lain. Sebagai persona manusia memang mampu berdiri sendiri. Akan tetapi ia tidak bisa ada dan berkembang tanpa kehadiran subyek lain. Eksistensi manusia adalah koeksistensi.¹ Artinya adanya manusia merupakan ada bersama (dengan yang lain). Persoalan tentang ada bersama ini bermuara pada dua hal penting tentang kenyataan homogenitas dan heterogenitas.

Dalam diskursus tentang homogenitas dan heterogenitas itu, pluralitas sosiologis dan pluralitas kodrati mementahkan anggapan murahan tentang adanya homogenitas kultural, sosial, dan ideologis. Masyarakat *in se* plural secara kodrati karena dihuni individu yang khas dan unik. Selain itu, terdapat juga pluralitas sosiologis yang berbicara tentang fakta identitas relasional manusia dengan yang lain. Pluralitas sosiologis merujuk pada keragaman etnis, suku, bangsa, dan kelompok lainnya. Fakta keragaman itu semakin jelas dalam negara-negara sebagai hasil kontrak politik. Menurut pencatatan oleh Kymlicka data tahun 1995, terdapat 600 rumpun bahasa (dari sekitar 6000 bahasa di dunia) dan 5.000 kelompok etnis yang tersebar di 184 negara merdeka.² Kenyataan pluralitas ini menggambarkan dan memastikan bahwasanya homogenitas suku, etnis, bangsa, dan kelompok lainnya merupakan mitos lama yang sudah harus ditinggalkan dan ditinggalkan.

¹Kasdin Sihotang, *Filsafat Manusia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hal. 102.

²Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory Of Minority Rights*, (New York: Oxford University Press, 2005), hal. 17.

Dalam kenyataan pluralitas ini, terdapat banyak tanggapan yang semuanya dapat dikategorisasikan ke dalam dua kelompok yakni: *pertama*, kelompok yang melihat dan memahami pluralitas atau keragaman suku, etnis, bangsa dan kelompok lainnya sebagai keuntungan bagi sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun perlu disadari pula akan kelompok *kedua* yang memandang dan memahami keragaman tersebut sebagai kerugian yang harus diatasi atau dinegasi; karena itu kelompok kedua ini menjadi ancaman besar dalam sebuah tatanan kehidupan bersama.

Dampak yang ditimbulkan oleh reaksi kelompok yang kedua ini sangat jelas. Pada tataran politik internasional, runtuhnya Yugoslavia dan komunisme Soviet memberi hikmah. Suatu politik yang ingin melancarkan homogenisasi atas keragaman sosial kultural di bawah penindasan sebuah ideologi dan kekerasan politis justru ‘menabung’ dendam kultural. Elemen-elemen kolektif yang ditekan itu pada gilirannya akan memberontak dan mendekonstruksi tatanan politis dan ideologis bersama itu.³

Dalam konteks Indonesia, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang multikultural. Realitas multikulturalitas di Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke menghasilkan tanggapan yang sama sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain. Sebagaimana dicatat oleh Jacques Bertrand, bahwa antara tahun 1996 dan 1997 telah terbunuh sekitar 10.000 orang karena kekerasan antaretnis di Indonesia. Pada 1996-1997 dan pada 2001, kekerasan antarsuku Dayak dan Madura memakan korban sekurang-kurangnya 10.000 warga dan mengakibatkan terusirnya ratusan ribu orang Madura dari Kalimantan. Antara tahun 1999-2000, sekitar 5.000 orang terbunuh dalam perang yang melibatkan para pemeluk agama Islam dan

³F. Budi Hardiman, *Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hal. 73-74.

Kristen. Dalam masa-masa krisis pasca-referendum di Timor-Timur, kurang lebih 1.000 orang dibunuh dan 200.000 orang kehilangan tempat tinggal.⁴

Pelbagai konflik di atas membawa kesadaran bahwa keragaman bukan hal yang sederhana dan karena itu butuh tanggapan yang serius. Keberagaman dengan sendirinya memetakan masyarakat dalam kelompok-kelompok demi mempertahankan kelompok masing-masing. Alhasil, kelompok yang lebih besar atau dalam terminologi profan disebut sebagai mayoritas mempunyai peranan penting dalam penentuan kebijakan suatu tatanan kehidupan bernegara. Sedangkan kelompok yang lebih kecil dikenal sebagai kelompok minoritas merupakan kelompok yang siap patuh terhadap kebijakan yang telah dibuat mayoritas. Oleh karena itu, untuk menjaga eksistensinya dalam sebuah tatanan, maka kelompok minoritas menuntut agar diakui dan dijamin keberadaannya. Tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok (minoritas) yang merebak menjadi konflik ketika tidak terpenuhi membawakan sebuah arena baru dalam percaturan politik; dan itulah yang akhirnya disebut sebagai politik identitas.

Tuntutan politik identitas menggambarkan tugas yang perlu dihadapi sebuah negara demokratis yang multikultural. Politik identitas mengkritik kebijakan negara demokrasi modern yang mengejawantahkan kebijakan asimilasi berhadapan dengan tuntutan kaum minoritas. Namun, politik identitas melahirkan suatu kecemasan baru dalam sebuah negara. Kecemasan ini cukup rasional bahwa akomodasi tuntutan minoritas dapat menghancurkan kesatuan nasional.⁵ Maka dalam suatu tatanan kehidupan bernegara, akomodasi tuntutan-tuntutan ini menjadi persoalan yang sangat dilematis.

⁴Jacques Bertrand, *Nationalism And Ethnic Conflict In Indonesia*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hal. 2.

⁵Redem Redem, *Senandung Suara-suara Minor*, (Bandung: Pustaka Matahari, 2016), hal. 21-22.

Oleh karena itu, dibutuhkan konsep politik yang dapat menangani persoalan-persoalan keberagaman suku, etnis, bangsa, dan kelompok lainnya yang berkisar di antara terminologi masyhur- *keadilan*. Konsep tentang keadilan ini pun menjadi perdebatan panjang antara kaum liberalis dan kaum komunitarian. Dan paham multikulturalisme hadir untuk menengahi perdebatan panjang tersebut. Multikulturalisme menggugah sebuah pertanyaan penting, yakni tentang bagaimana orang-orang yang berbeda dapat hidup bersama dalam satu komunitas. Multikulturalisme membangkitkan sejumlah pertanyaan lainnya, seperti tentang klaim orang-orang pribumi yang merupakan minoritas dalam masyarakat yang lebih luas; tentang hak dan kewajiban para imigran dalam masyarakat tuan rumah (*host society*): tentang sejauh mana keragaman budaya harus ditoleransi (atau dipromosikan) dalam suatu masyarakat; dan tentang pentingnya gagasan kewarganegaraan dan identitas nasional.⁶

Konsep politik multikulturalisme perspektif William Kymlicka dalam buku *Multikultural Citizenship*⁷ merupakan konsep yang dapat menjawab persoalan dilematis perihal hak-hak minoritas untuk mencapai suatu keadilan dalam kehidupan bernegara. William Kymlicka menawarkan teori liberal tentang hak-hak minoritas itu untuk hidup berdampingan dengan hak-hak asasi manusia, dan bagaimana prinsip-prinsip liberal menanggapi penetrasi hak-hak minoritas.⁸ Dalam hal ini, konsep politik ini dapat menjadi basis pikiran dalam menghadapi suatu realitas politik identitas.

⁶Candra Kukathas, *Multicultural Citizens: The Philosophy And Politics Identity*, (Melbourne: The Centre For Independent Studies Ltd, 1993), hal. 1.

⁷Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory Of Minority Rights*, (New York: Oxford University Press, 2005).

⁸Edlina Hafmini Eddin (penerj.), *Kewargaan Multikultural*, dari buku Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory Of Minority Rights*, (Jakarta: Pustaka LP3S, 2003), hal. 8.

Maka untuk dapat menjawab persoalan yang timbul dari keberagaman ini, terutama mengenai polemik politik identitas yang ada di Indonesia; terutama mengenai keadilan bagi kaum minoritas dalam sebuah tatanan politis, peneliti hendak mengkaji lebih dalam perihal konsep politik multikulturalisme yang digagas oleh William Kymlicka tersebut. Upaya ini akan dilakukan oleh peneliti di bawah judul: “MEMAHAMI KONSEP POLITIK MULTIKULTURALISME PERSPEKTIF WILLIAM KYMLICKA DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas maka kiranya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa latar belakang kelahiran konsep politik multikulturalisme William Kymlicka?
2. Bagaimanakah konsep politik multikulturalisme William Kymlicka?
3. Bagaimana realitas multikulturalitas dan konteks politik identitas di Indonesia?
4. Bagaimana relevansi pandangan politik multikulturalisme William Kymlicka dalam konteks politik identitas di Indonesia?

Permasalahan tersebut akan menjadi bahan pergelutan peneliti dalam menyelesaikan tulisan ini.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang `kelahiran konsep William Kymlicka tentang politik multikulturalisme.

2. Untuk mengetahui konsep William Kymlicka tentang politik multikulturalisme.
3. Untuk mengetahui realitas multikulturalitas dan konteks politik identitas yang ada di Indonesia.
4. Untuk mengetahui relevansi pandangan politik multikulturalisme William Kymlicka dalam konteks politik identitas di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penulisan

Penyelesaian tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pelbagai bidang kehidupan, sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Masyarakat Umum

Tulisan ini diharapkan dapat memberi masukan untuk para wakil rakyat dan masyarakat umum demi membangun suatu tatanan politis di dalam kehidupan berpolitik. Konsep politik multikulturalisme ini dapat diterapkan dalam konteks negara mana pun juga karena prinsip dasar keanekaragaman masyarakat yang nyata dalam setiap negara. Dengan demikian, kaum minoritas sebagai kelompok yang diperjuangkan dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik dan diakui keberadaannya serta dapat mengaktualisasikan kebebasannya sehingga dapat tercapai keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.4.2 Bagi Civitas Academica Unika Widya Mandira Kupang Dan Fakultas Filsafat

Melalui kajian literer ini peneliti hendak memberikan sumbangan berupa sebuah landasan berpikir yang kritis, sistematis, dan logis mengenai pemikiran William Kymlicka, yang belum begitu dikenal oleh Civitas Academica Unika Widya Mandira Kupang dan Fakultas Filsafat. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.3 Bagi Pribadi Peneliti

Agar peneliti memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai dalam bidang ilmu yang digeluti peneliti. Secara khusus, peneliti dapat menanggapi dan mengkaji secara kritis gagasan dari tokoh yang diteliti.

1.5 Metode Penelitian

Dalam menguraikan pemikiran William Kymlicka tentang politik multikulturalisme, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan. Peneliti mencari dan merangkum data-data kepustakaan dari buku-buku menyangkut tema tulisan. Dari pelbagai literatur itu, peneliti mengkaji pemikiran William Kymlicka, baik dari teksnya sendiri maupun dari tulisan-tulisan tentangnya, kemudian menyusunnya menggunakan bahasa dan pemahaman peneliti. Hal ini berlaku pula dalam studi selanjutnya, yakni relevansi pemikiran William Kymlicka dalam konteks politik identitas di Indonesia.

1.6 Sistematika Penelitian

Agar dapat dipahami secara runut dan sistematis, maka peneliti menguraikan dan menyajikan tulisan ini ke dalam lima bab, sebagai berikut:

Pertama, Bab I, yaitu bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Kedua, Bab II, berisi catatan untuk memperkenalkan tokoh yang diteliti, yakni William Kymlicka. Oleh karena itu, dalam bagian ini peneliti memaparkan biografi singkat mengenai Kymlicka, tokoh-tokoh yang mempengaruhi, karya-karyanya, dan beberapa catatan perihal latar

belakang pemikirannya yang mendasari atau yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran tentang politik multikulturalisme, baik latar belakang sosial politis maupun latar belakang teoretis.

Ketiga, Bab III. Dalam bagian ini, peneliti memaparkan pokok-pokok pemikiran William Kymlicka tentang politik multikulturalisme. Pokok-pokok pikiran Kymlicka tentang politik multikulturalisme ini, peneliti uraikan ke dalam beberapa poin penting, yakni, konsep kewarganegaraan (sebagai status, kebijakan sipil, dan jati diri kolektif), negara multibangsa dan negara polietnis; tiga bentuk hak yang dibedakan: hak atas pemerintahan sendiri, hak-hak polietnis, dan hak perwakilan khusus; tanggapan Kymlicka atas pembatasan internal dan perlindungan eksternal.

Keempat, Bab IV, berisi kajian peneliti tentang realitas multikulturalitas di Indonesia, dengan menelaah keragaman yang ada di Indonesia; dan beberapa catatan, mengenai multikulturalisme dalam kaitan dengan "*Bhineka Tunggal Ika*", pluralisme, dan monokulturalisme. Kemudian, catatan mengenai politik identitas dan analisis kemungkinan relevansinya konsep politik multikulturalisme William Kymlicka dalam konteks politik identitas di Indonesia.

Kelima, Bab V merupakan bagian penutup yang berisi tinjauan kritis dari teoretikus lain maupun dari peneliti. Kemudian, peneliti juga memaparkan kesimpulan singkat untuk menutup tulisan sederhana ini, serta memberikan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya.